

Peran Pemuda Dalam Pilkada Serentak

Erisandi Arditama, Wenny Eka Septina

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

erisandi@mail.unnes.ac.id; wennyeka@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Agenda mendesak yang perlu dikaji saat ini adalah bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya terkait dengan peran *civil society*. Pergeseran paradigma dari *state centered* menjadi *society centered* memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk turut serta mengembangkan kehidupan demokrasi di negeri ini. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik, sebab hakikat manusia termasuk pemuda adalah *zoon politicon* atau mahluk politik. Pemuda menjadi salah satu target sasaran dalam setiap pemilu maupun pilukada. Hal ini disebabkan karena suara pemuda seringkali masih mengambang, sehingga menjadi rebutan bagi kandidat maupun partai politik yang bertarung dalam pemilu/pilukada. Disamping itu, fokus yang dikaji dalam tulisan ini adalah peran karangtaruna. Karangtaruna mempunyai relasi yang kuat dengan pemuda, dimana karangtaruna merupakan organisasi awal yang bisa diikuti oleh pemuda. Karang Taruna memiliki andil penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda.

Kata Kunci: *Peran Karang Taruna, Partisipasi Politik, Pilgub Jateng 2018.*

Abstract

Urgent actions that need to be examined now is how to efforts to improve the community political participation, particularly relating to the role of civil society. Paradigm shift from state centered become society centered give a higher probability to the community to continue to and to develop the democracy in this country. As part of national components, youth cannot escape from political and evasive, for all people including the youth is zoon politicon or political creature. Youth becomes one of targets in goals in any election and general election. This is because the youth often still floating, so that it becomes rebutan for candidates and political parties who fought in elections / general election. Besides, focus examined in this post is the role of karangtaruna. Karangtaruna have strong relationships with youths, where are the early karangtaruna can be followed by a youth. The organization has any important to gain political participation of youth.

Keywords: *The role Karangtaruna; Political Participation, Pilgub Central Java 2018.*

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara penganut paham demokrasi, perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia menarik untuk disimak. Pasca reformasi 1998, kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan yang bertumpu pada pergeseran pola kehidupan politik yang semula otoritarian menjadi lebih demokratis. Salah satu kunci kehidupan demokratis adalah adanya pemilu baik ditingkat pusat maupun lokal. Pemilu merupakan salah satu kunci untuk memilih pemimpin, yang idealnya berorientasi pada masalah kesejahteraan masyarakat.

Terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia, masih sebatas penyelenggaraan ritual lima tahunan belaka, baik dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini dibuktikan banyaknya kekacauan yang terjadi mulai dari kesemrawutan menjelang pemilu, proses pemungutan suara yang seringkali menimbulkan polemik antara pihak-pihak yang berkompetisi, hingga masalah *money politic* yang belum juga menemukan

titik terang penyelesaiannya. Bahkan, dalam kaitannya pemilihan umum di tingkat daerah, sistem dirubah menjadi pemilukada serentak dengan tujuan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum di negeri ini masih penuh masalah.

Pemilukada belum menyentuh pada keinginan bahwa hal tersebut wadah yang begitu penting untuk meregenerasi tampuk kepemimpinan agar tercipta kondisi negara yang kondusif. Jika hal ini terus menerus dibiarkan tentu akan menyebabkan angka partisipasi politik menjadi turun. Padahal jika diamati secara lebih dalam, partisipasi politik merupakan konsep vital dalam demokrasi. Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam

pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Jika partisipasi politik masyarakat turun, tentu akan mengancam eksistensi demokrai itu sendiri.

Salah satu target penting dalam setiap pemilihan umum adalah keberadaan generasi muda sebagai *swing voter*, dimana suaranya masih sering mengambang, belum loyal kepada salah satu kandidat maupun partai politik tertentu. Suaranya sering diperebutkan, sehingga generasi muda, utamanya pemilih pemuda menjadi obyek yang seksi dalam setiap momen pemilukada. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of*

change (agen perubahan). Ini merupakan sebuah signal, bahwa pemuda merupakan pemilih yang kritis, yang mempunyai andil besar dalam membawa perubahan bagi negara.

Dalam iklim demokrasi, salah satu topik yang mendesak yang perlu dikaji saat ini adalah bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya terkait dengan peran *civil society*. Pergeseran paradigma dari *state centered* menjadi *society centered* memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk turut serta mengembangkan kehidupan demokrasi di negeri ini. Artinya, lembaga-lembaga sosial maupun kemasyarakatan berperan lebih signifikan dalam pengembangan kehidupan politik. Salah satu organisasi yang dikaji dalam tulisan ini adalah karang taruna, sebagai organisasi awal yang ada di daerah. Karang Taruna memiliki andil penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Selama ini Karang Taruna telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.

Ke depan, seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial masyarakat, Karang Taruna dituntut agar lebih meningkatkan dan mempertajam peranannya dalam pembangunan bidang pemberdayaan pemuda di berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Oleh karena itu, Karang Taruna harus lebih profesional dan mandiri dalam kiprahnya agar lebih optimal dalam mengatasi berbagai macam permasalahan politik yang terjadi di negeri ini. Diakui, eksistensi Karang Taruna di era reformasi sekarang ini terkesan semakin tenggelam, bahkan Karang Taruna di berbagai daerah kebanyakan sudah non aktif. Banyak anggapan bahwa, keberadaan Karang Taruna diragukan, apakah masih eksis dan masih ada kegiatannya. Terkesan bahwa Karang Taruna kurang diperhatikan. Padahal melalui Karang Taruna pembangunan generasi muda sejak awal sudah bisa dilakukan. (Fatoni, 2015).

Metode

Menurut Suparlan penelitian kualitatif sering juga dinamakan pendekatan yang humanistik karena

didalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari masyarakat yang diteliti berkenaan dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang harus dikumpulkan (Liliana, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada analisis data, yang dikumpulkan kemudian diolah dan dikodifikasikan kemudian dianalisa, hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar melihat peranan pemuda dalam menyongsong pilkada.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa triangulasi dilakukan berdasarkan (berbasis) data yang ada. Oleh karena itu perencanaan terhadap triangulasi diawali dengan

mencermati data yang sudah dimiliki dan kemudian merencanakannya dengan berbagai pendekatan triangulasi yang berbeda dengan pengumpulan data terdahulu, namun sesuai untuk mendapatkan pengecekan data. Misalnya dengan memvariasikan berbagai model seperti: *Timetriangulation*, *Space triangulation*, *Combined levels of triangulation*, *Theoretical triangulation*, *Investigator triangulation*, *Methodologica triangulation* atau berdasarkan cara pengambilannya seperti: *Data triangulation*, *Investigator triangulation*, *Theory triangulation*, *Methodological triangulation*, and *Environmental triangulation* (Bachri, 2010).

Teknis dalam proses triangulasi adalah menggabungkan berbagai jenis data, kemudian di cek melalui pendapat tokoh serta literature buku, sehingga diperoleh hasil pengecekan berdasarkan sumber lain di luar data itu sendiri.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada

Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang begitu populer dalam ilmu politik. Kajian ini juga banyak dibicarakan di kalangan ahli politik, sehingga pada penjabarannya, partisipasi politik memiliki definisi yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 20018).

Sementara itu, menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang

berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. (Surbakti, 2007)

Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. (Surbakti, 2007).

Dalam konteks pengembangan kekuatan masyarakat dalam mewujudkan demokratisasi, asumsi yang dibangun ialah terjadi perubahan atau pergeseran yang amat

drastis dari *state centered development* menuju *society centered development* (Agustino, 2007).

Hal ini berpengaruh bahwa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dalam hal ini lembaga sosial sangat berperan. Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hechter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah organisasi pemuda, yang dalam penelitian akan difokuskan pada karang taruna. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi, khususnya generasi muda.

Pemuda dan Karangtaruna : Partisipasi Politik Harus Meningkat

Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik, sebab hakikat manusia termasuk pemuda adalah *zoon politicon* atau mahluk politik. Pemuda merupakan sosok idealis, sosok yang kuat tetapi perlu motivasi, kelompok yang memiliki peran tetapi butuh arena. Kelompok yang menentukan masa depan tetapi perlu diberikan kesempatan dan kelompok potensial yang dapat apa saja namun perlu pengakuan. Sejarah telah mencatat betapa peran dan kiprah pemuda dalam melakukan perubahan peradaban, dan pencerahan sangatlah menentukan tidak terkecuali dalam kehidupan politik.

Peran politik pemuda dapat dilihat dari: pertama, partisipasi politik pemuda sebagai bagian dari sistem politik yakni dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dalam supra struktur politik, pemuda merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

sistem pemerintahan. Sebagai warga negara setiap pemuda harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara, termasuk melakukan bela negara. Dalam infrastruktur politik, pemuda dapat berkiprah dalam kegiatan partai politik, pada kelompok kepentingan, maupun kelompok penekan. Inilah arena politik yang dapat digunakan oleh pemuda dalam berpartisipasi.

Sentuhan idealisme dan daya kritis pemuda sangatlah diperlukan utamanya dalam mengawal proses transisi demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini. Pilihan terhadap sistem demokrasi dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membutuhkan dukungan semua pihak untuk mengawal proses demokrasi agar dapat berjalan dan mempercepat pencapaian tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Proses demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini perlu dikawal, agar tidak terjadi stigma negatif terhadap demokrasi itu sendiri. Jangan sampai berkembang anggapan bahwa demokrasi justru

menjadikan rakyat sangsara, harga-harga menjadi mahal, rakyat susah untuk mendapat penghidupan, kerusuhan terjadi dimana-mana, oleh karenanya lebih baik kembali ke masa otoriter seperti pada masa yang lalu. Stigma ini tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang dianggap sebagai pilihan terbaik bagi kemaslahatan masyarakat.

Dari pemaparan tersebut, partisipasi politik pemuda dalam kehidupan demokrasi menjadi sangat penting dan strategis oleh karena : pemuda harus dapat tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, artinya kehidupan demokrasi harus dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sikap dan perilaku politik yang dijalankan harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara dan menggunakan cara-cara kekerasan atau premanisme politik. Pemuda juga harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi; menghormati hak dan kewajiban orang lain,

menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik.

Salah satu yang dapat mewadahi aktivitas pemuda dalam politik adalah karang taruna. Karang Taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial (Wenti, 2013).

Selama ini Karang Taruna telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Ke depan, seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial masyarakat, Karang Taruna dituntut agar lebih meningkatkan dan mempertajam peranannya dalam pembangunan bidang pemberdayaan pemuda di berbagai bidang.

Diakui, eksistensi Karang Taruna di era reformasi sekarang ini terkesan semakin tenggelam, bahkan Karang Taruna di berbagai daerah kebanyakan sudah non aktif. Banyak anggapan bahwa, keberadaan Karang Taruna diragukan, apakah masih eksis dan masih ada kegiatannya. Terkesan bahwa Karang Taruna kurang diperhatikan. Padahal melalui Karang Taruna pembangunan generasi muda sejak awal sudah bisa dilakukan. Sebab ada kecenderungan kelompok-kelompok yang sangat erat terpadu biasanya berkarya dan memiliki produktivitas yang tinggi. Keterpaduan setiap kelompok, termasuk didalam organisasi pemuda, akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti frekuensi pertemuan, komitmen terhadap tujuan kelompok, dan soliditas serta kemudahan komunikasi antar anggota kelompok (Cushway dan Lodge, 1993).

Eksistensi Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan saat ini masih tumbuh dan berkembang. Ini atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial diri, oleh

dan untuk generasi muda terhadap permasalahan sosial di lingkungannya. Sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial yang mempunyai posisi strategis dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat tingkat akar rumput, Karang Taruna punya andil melalui program-program pemberdayaan yang berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk sumberdaya manusia agar tercapai tingkat kemandirian dan profesionalitasnya. Karang Taruna sebagai lembaga sosial kepemudaan non partisan memiliki peran vital dalam melakukan mobilisasi kepada para pemuda agar memiliki kesadaran hidup bermasyarakat yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan demokratisasi, karang taruna dapat berperan secara apik untuk mengawal aktivitas politik pemuda dalam musim pemilukada seperti sekarang ini. Pencerdasan politik harus dilakukan karena ternyata masih banyak generasi muda yang memiliki pemahaman pragmatis dan populis

terhadap politik. *Upgrading* juga dapat dilakukan terhadap pemuda yang telah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai politik. Melalui karang taruna diharapkan pemuda untuk mulai berpikir dan melakukan tindakan konkrit untuk memberikan suatu pencerahan, serta solusi untuk berbagai persoalan politik demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, melalui peran yang diemban karang taruna, diharapkan partisipasi politik generasi muda dapat terus meningkat, bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga dalam hal kualitas.

Untuk mengembangkan partisipasi politik pemuda, karangtaruna bisa memosisikan dirinya sebagai inisiator untuk bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Pihak yang dimaksud tentunya yang terlibat dengan penyelenggaraan pemilu, seperti pemerintah daerah, Bawaslu, KPU (baik tingkat daerah maupun pusat), serta aparat penegak hukum. Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam

pemberdayaan karangtaruna. Selain itu, karangtaruna juga perlu bermitra dengan lembaga perwakilan, dimana lembaga ini merupakan jembatan antara pemerintah dan rakyat untuk saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan negara. Melalui kerjasama ini, komunikasi yang efektif antara wakil dan terwakil dapat mendorong karangtaruna mengambil peran lebih dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

Aktor lain yang harusnya menjadi mitra karangtaruna terkait upaya peningkatan peran politik adalah Bawaslu dan KPU, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, tentunya kerjasama dengan kedua aktor tersebut akan menarik sebab akan membahas hal-hal teknis dan praktis di lapangan. Seperti kita ketahui, masih banyak masyarakat, khususnya pemilih pemula yang awam terhadap proses pemilihan umum. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan sosialisasi dan edukasi politik mutlak dilakukan. Dengan adanya edukasi politik, diharapkan pemuda dapat melek politik. Pemilu

bukan sekedar arena untuk meraih kekuasaan, tetapi merupakan jembatan untuk menyaring dan meraih hati masyarakat. Pemilu juga bukan hanya ritual lima tahunan yang setelah digelar euforianya akan hilang, lebih dari itu, dalam demokrasi pemilu berfungsi untuk memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemuda harus mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemilu, termasuk hal-hal yang harus diawasi dalam pemilu sehingga ketika ada penyimpangan bisa ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Pemilu kerap dipandang sebagai penentu nasib bangsa ke depan, pemilu seringkali tampil bukan sebagai sarana pemersatu rakyat. Justru sebaliknya, pemilu rentan menjadi pemicu bagi perpecahan, khususnya pada massa di tataran akar rumput. Bagaimana tidak, menjelang tahun politik misalnya, drama-drama yang terjadi dalam panggung politik tak jarang mengakibatkan tensi masyarakat menjadi tinggi. Pemilu dapat

dikatakan sebagai momen kritis, dimana setiap kandidat berlomba-lomba untuk memperoleh suara rakyat dan pelaksanaannya cenderung rawan konflik. Oleh karena itu, karangtaruna perlu melebarkan sayap untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan keamanan. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi pada eskalasi politik yang tinggi.

Salah satu lembaga yang disebut jantungnya demokrasi, yaitu partai politik juga perlu dilirik untuk mengembangkan peran karangtaruna. Meskipun karangtaruna adalah lembaga yang netral, tidak berafiliasi pada partai politik manapun, tetapi kerjasama dengan partai politik dinilai penting untuk dapat lebih memahami peran parpol dalam negara yang demokratis. Seperti kita ketahui, secara ideal, parpol memiliki fungsi yang beragam, mulai dari rekrutmen politik, wadah artikulasi politik, agregasi kepentingan, hingga sebagai wadah pengatur konflik. Hanya saja, dalam ranah praktis, kebanyakan masyarakat belum merasakan fungsi-fungsi partai

politik karena biasanya partai politik akan mulai melaksanakan fungsinya hanya saat menjelang pemilu. Pemuda perlu menganalisis persoalan ini.

Kesimpulan

Pemuda sebagai warga kritis merupakan obyek yang menarik dalam setiap kajian politik. Misalnya saja saat menjelang pemilu, suara pemuda merupakan salah satu yang diperebutkan. Hal ini disebabkan pilihan politik pemuda yang belum loyal kepada partai politik tertentu. Suara pemuda masih mengambang, dan dapat berubah dari waktu tertentu dengan berbagai pertimbangan rasional. Ini tentunya membawa angin segar bagi proses demokratisasi negeri ini. Hanya saja, hal tersebut juga perlu diantisipasi karena semakin kritis maka kemungkinan untuk apatis dalam proses politik juga semakin besar. Hal ini terkait dengan stigma yang terlanjur berkembang, bahwa politik tak lebih dari arena perebutan kekuasaan belaka.

Sebagai organisasi yang netral yang tidak terafiliasi dengan

partai politik, Karangtaruna mempunyai kesadaran penuh untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Karangtaruna dan pemuda merupakan kesatuan penting dalam kehidupan, mengingat karangtaruna merupakan lembaga sosial pertama yang diikuti oleh pemuda. Hanya saja, dalam praktiknya, memang tidak mudah dalam memberikan peranan yang lebih besar terkait politik kepada karangtaruna. Hal ini disebabkan beberapa alasan yang berkembang, salah satunya adalah politik telah mengalineasi masyarakat dalam kehidupannya. Menjelang tahun politik 2019, peranan yang lebih besar untuk meningkatkan kontribusi karangtaruna mutlak dilakukan. Karangtaruna yang ikut andil dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda akan memberikan efek domino diberbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang efektif antara karangtaruna dengan berbagai aktor terkait seperti pemda, Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum dan sebagainya. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak atau

lembaga-lembaga lain, efek domino dari pendidikan politik dapat lebih dirasakan secara mendalam. Selain itu, dalam diri karangtaruna sendiri juga harus konsisten dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemuda, agar tidak apatis dan ikut mengawal setiap proses politik yang ada.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan* , 46 - 62.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. California: Sage Publication Inc.
- Cushway, Barry dan Derek Logde. (1993). *The Fast-track MBA Series Organizational Behaviour and Design (Perilaku dan Desain Organisasi)*. Jakarta : Gramedia.
- Fatoni, Muhammad Taufik. (2015). *Peran Karang Taruna Sejati Dalam Upaya Pemberdayaan Pemuda Bidang Wirausaha di Desa Sendangsari, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang : Intrans.
- Liliana, N. R. (2014). Strategi Komunikasi Pemasaran Politik Dalam Kampanye Calon Legislatif (Caleg) Terpilih Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dalam Pemenangan Pileg 2014 Kota Pekanbaru. *JOM FISIP* , 1 - 11.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- Wenti. (2013). *Eksistensi Karang Taruna dalam Aktivitas Kepemudaan (Studi Kasus di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)*. Ejournal Pemerintahan Integratif.